
**ANALISIS PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN NGADA**

Matilde Meo;¹⁾ Suryaningsi²⁾

¹⁾Alumnus Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang

²⁾Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang

Email: suryaningsi91@gmail.com

ABSTRACT

The background in this study with the phenomenon observed in the development of the public sector today is the increasing demands for the implementation of public accountability by public sector organizations. Public institutions, both central and regional, are demanded for accountability, so that all government agencies are required to prepare strategic plans, measure performance and report by striving to provide the best services in a transparent and quality manner. This study aims to examine the effect of the presentation of regional financial reports and the accessibility of regional financial reports on the accountability of regional financial management either partially or simultaneously. Sources of data obtained from the results of respondents' answers to questionnaires that have been distributed. The population is the PPKAD office of Ngada Regency and the research sample consists of 40 staff from the secretariat, verification, budget, revenue and treasury fields. The method used in this research is descriptive method and quantitative method. The method of analysis uses multiple regression analysis. The results of this research hypothesis testing indicate that partially the presentation of regional financial reports and the accessibility of regional financial reports has a positive effect on the accountability of regional financial management. Simultaneous testing shows the presentation of regional financial reports and the accessibility of regional financial reports have a significant effect on the accountability of regional financial management.

Keywords: presentation of regional financial statements, accessibility of regional financial reports, accountability of regional financial management.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini membuat tuntutan masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik meningkat. Hal ini, seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (akuntability) dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerjanya. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap undang-undang.

Fenomena yang diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (Fauzan dkk, 2017). Lembaga-lembaga publik baik pusat maupun daerah mendapat tuntutan akuntabilitas, sehingga seluruh instansi pemerintah wajib menyusun perencanaan strateginya, melakukan pengukuran kinerja serta melaporkan dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas. Hal tersebut sangat perlu dilakukan sehingga dapat memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan uang publik. Dengan adanya penyajian laporan keuangan daerah yang baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun tampilan opini audit yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah Kabupaten Ngada dari Tahun 2014-2019:

Tabel 1. Opini audit yang diberikan BPK bagi Kabupaten Ngada

No	Tahun	Opini audit yang diberikan BPK
1.	2014	Wajar dengan pengecualian (WDP)
2.	2015	Wajar dengan pengecualian (WDP)
3.	2016	Wajar dengan pengecualian (WDP)
4.	2017	Wajar dengan pengecualian (WDP)
5.	2018	Wajar tanpa pengecualian (WTP)
6.	2019	Wajar tanpa pengecualian (WTP)

Sumber: Badan pemeriksa keuangan (2019)

Meskipun laporan BPK menyatakan bahwa terdapat perubahan yang bagus di tahun 2018 dan 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Ngadatentunya harus tetap diaudit oleh BPK. Salah satu alasan mengapa BPK harus terus melakukan audit terhadap otonomi daerah adalah masih sering terjadi berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa aparatur daerah. Sebagai contoh, pada tahun 2014 beberapa aparatur pengurus daerah terlibat kasus penyalagunaan dana bantuan sosial (BANSOS) yang merugikan negara sekitar 5 miliar dari total 12,5 miliar dana BANSOS yang ada (Kelen, 2014) Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Fauziah, 2017). Hal ini sejalan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 9 ayat 4 tahun 2008 yang berisi tentang kewajiban bagi setiap badan untuk menyebarluaskan informasi publik secara berkala, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Penyajian laporan keuangan daerah yang komprehensif adalah salah satu alat untuk memfasilitas terciptanya akuntabilitas publik (Superdi, 2017). Pemerintah daerah harus mampu memberikan pertanggungjawaban laporan keuangannya kepada masyarakat. Saat ini, pelaporan pertanggungjawaban pemerintah terkait keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan dan kinerja kepada masyarakat baik langsung atau diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat diketahui melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan website (internet) pemerintah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Sanjaya dkk, 2014). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002) dalam (Sumiyati 2015). Dalam kaitannya untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangannya secara baik dan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses melihat pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat untuk menciptakan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan aksesibilitas yang komprehensif. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada merupakan salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi NTT menetapkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal laporan keuangan daerah. Ady Sudibyo menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan dua tahap yakni pemeriksaan intern pada bulan Februari hingga Maret

2019 dan melakukan pemeriksaan terinci pada bulan April sampai akhir Mei 2019. Untuk kabupaten Ngada yang sudah mendapatkan opini WTP, diminta untuk tetap menyelesaikan beberapa hal yang menjadi perhatian, agar permasalahan tersebut tidak menjadi lebih besar yang dapat mempengaruhi penilaian opini pada tahun-tahun yang akan datang. Salah satu alasan mengapa BPK harus terus melakukan audit terhadap laporan keuangan adalah masih sering terjadi berbagai penyimpangan yang dilakukan beberapa aparaturnya daerah. Hal ini terjadi pada tahun 2014 beberapa aparaturnya daerah terlibat kasus penyalagunaan dana bantuan sosial (BANSOS) yang merugikan negara sekitar 5 miliar dari total 12,5 miliar dana BANSOS.

Pada tahun 2018 juga terdapat aparaturnya pemerintah daerah yang tertangkap tangan menerima suap. Agar dapat mengurangi perilaku-perilaku menyimpang dalam praktik, salah satu cara yang harus diupayakan adalah menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan bersih atau yang sering disebut dengan *good governance* (*portal.ngadakab.go.id 2019*).

Berdasarkan penjelasan dan pertentangan hasil beberapa penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada”. Dengan Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial? dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Yang membuat laporan keuangan daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satu sarana untuk memenuhi akuntabilitas suatu perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini harus valid dan reliabel karena akan dilaporkan kepada stakeholder. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Siti dan Aida, 2012).

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Miftahul Reza, Fauziah dan Nur Handayani (2017) Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Pemerintah daerah harus memenuhi: (1) Keterbukaan (2) Kemudahan, dan (3) *Accesible*.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2010).

C. HIPOTESIS PENELITIAN

a. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Sande (2013) menyatakan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Sande, 2013). maka dapat dibangun hipotesis:

H3: Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

D. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian adalah data primer (*primary data*) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/ suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti (Siregar, 2013). Sumber data dari penelitian ini adalah dari hasil jawaban responden atas kuesioner yang sudah disebarkan yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Populasi pada penelitian ini adalah Dinas PPKAD Kabupaten Ngada dengan sampel penelitian sebanyak orang 40 yang di ambil dari staf bidang sekretariat, bidang verifikasi, bidang anggaran, bidang pendapatan dan bidang pembendaharaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara langsung pada Dinas PPKAD Kabupaten Ngada. Menurut (Sugiyono,

2014) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dikarenakan keterbatasan jarak peneliti atau Lockdown yang terjadi karena covid-19 peneliti memutuskan untuk menggunakan bantuan aplikasi *google form* dimana aplikasi ini berguna untuk menyebarkan kuesioner secara cepat dan luas melalui link yang dibagikan kepada subjek penelitian.

Definisi variabel operasional

- 1) Variabel X1 Penyajian laporan keuangan daerah : Dimensi yang digunakan (1) Relevan indikatornya (Manfaat, umpan balik, Manfaat prediktif, Tepat waktu, lengkap (2) Andal indikatornya (Penyajian jujur, Dapat diverifikasi, Netralitas) (3) Dapat dibandingkan indikatornya (Perbandingan internal, Perbandingan eksternal) (4) Dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010) indikatornya: (Memiliki pengetahuan yang memadai)
- 2) Variabel X2 Aksesibilitas laporan keuangan daerah dimensi yang digunakan : (1) Terbuka di media masa indikatornya (Laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media masa) (2) Mudah diakses indikatornya (Pihak eksternal dapat mengakses informasi laporan keuangan melalui internet) (3) Ketersediaan informasi Wahida (2015) indikatornya (Informasi laporan keuangan yang dipublikasikan secara lengkap)
- 3) Variabel Y Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimensi yang digunakan (1) Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum indikatornya (Penghindaran penyalagunaan jabatan, Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam (2) Akuntabilitas proses penggunaan sumber dana public indikatornya (kecukupan sistem informasi akuntansi, Sistem informasi manajemen, Prosedur administrasi, (3) Akuntabilitas program indikatornya (Tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, Mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal Akuntabilitas kebijakan (Elowd 1993 dalam Mardiasmo 2009) indikatornya (Pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah).

Teknik analisis data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan metode survei dengan penyebaran kuesioner. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner. Kuesioner tersebut di distribusikan oleh peneliti secara langsung kepada responden tanpa melalui perantara. Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk penelitian kuantitatif.

Uji kualitas data

Uji kualitas data dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Uji validitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji seberapa besar dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsinya. Uji validitas dilakukan dengan metode korelasi product moment dari *pearson* dimana pengujian dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi (r_{xy}) yang menyatakan hubungan antar skor butir pertanyaan dengan skor total (*item-total correlation*).

b) Uji reliabilitas

Penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas *One Shot* atau pengujian sekali saja. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,07$ (Ghozali, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Uji normalitas. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *kolmogrov-smirnov*, dengan uji ini dapat diketahui data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Apabila

signifikan $> 0,05$ maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari $0,05$ maka data yang berdistribusi dalam penelitian ini tidak normal.

b) Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksud untuk membuktikan apakah terdapat hubungan linear antara variabel independen (multikolinearitas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat apabila *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Apabila tolerance value dibawah $0,10$ atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinearitas.

c) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas

Uji hipotesis

a) Uji regresi linear berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y	= akuntabilitas	pengelolaan keuangan daerah
X1	= Penyajian laporan keuangan daerah	
X2	= Aksesibilitas laporan keuangan daerah	
A	= Konstanta	
b1, b2	= Koefisien regresi	
e	= error	

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Uji signifikan (uji t), digunakan untuk menguji signifikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan level of significant (α) $0,05$. 2) Uji F, digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh simultan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan level of significant (α) $0,05$. 3) Uji koefisien determinasi (R), menunjukkan kecocokan yang menyatakan proporsi dan variasi total Y (variabel dependen) yang dapat diterangkan oleh X (variabel independen) dan sebagai ukuran linear yang menyatakan seberapa baik garis regresi yang cocok dengan data.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data bertujuan untuk menentukan kualitas kuesioner yang dipergunakan dalam penelitian. Artinya, kuesioner tersebut dapat mewakili atau mencerminkan keadaan pada penelitian. Berikut ini adalah uji kualitas data yang dilakukan pada penelitian ini:

Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika r hitung positif dan r hitung $> r$ tabel maka pertanyaan dinyatakan valid.
- Jika r hitung negatif dan r hitung $< -r$ tabel maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Berikut ini dibahas secara berturut-turut hasil uji validitas untuk masing-masing variabel:

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Table 3. Hasil Uji Validitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)

Variabel	r Hitung	r Tabel	Sig	Kriteria
X1.1	,445**	0.312	0.004	Valid
X1.2	,567**	0.312	0.000	Valid
X1.3	,320*	0.312	0.044	Valid
X1.4	,374*	0.312	0.017	Valid
X1.5	,526**	0.312	0.000	Valid
X1.6	,460**	0.312	0.003	Valid
X1.7	,641**	0.312	0.000	Valid
X1.8	,587**	0.312	0.000	Valid
X1.9	,686**	0.312	0.000	Valid
X1.10	,683**	0.312	0.000	Valid
X1.11	,598**	0.312	0.000	Valid
X1.12	,454**	0.312	0.003	Valid

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 40 orang, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = $n-2$. Jadi df untuk variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) = $40 - 2 = 38$ dan r tabelnya 0,312.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)

Variabel	r Hitung	r Tabel	Sig	Kriteria
X2.1	,838**	0.312	0.000	Valid
X2.2	,869**	0.312	0.000	Valid
X2.3	,859**	0.312	0.000	Valid
X2.4	,838**	0.312	0.000	Valid
X2.5	,730**	0.312	0.000	Valid
X2.6	,620**	0.312	0.000	Valid

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 40 orang, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = $n-2$. Jadi df untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2) = $40 - 2 = 38$ dan r tabelnya 0,312.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Table 5. Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Variabel	r Hitung	r Tabel	Sig	Kriteria
Y.1	,671**	0.312	0.000	Valid
Y.2	,803**	0.312	0.000	Valid
Y.3	,839**	0.312	0.000	Valid
Y.4	,829**	0.312	0.000	Valid
Y.5	,734**	0.312	0.000	Valid
Y.6	,672**	0.312	0.000	Valid
Y.7	,590**	0.312	0.000	Valid
Y.8	,592**	0.312	0.000	Valid
Y.9	,322*	0.312	0.042	Valid

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 40 orang, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = $n-2$. Jadi df untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) = $40 - 2 = 38$ dan r tabelnya 0,312.

Uji Reliabilitas

Koefisien reliabilitas instrument dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun hasil reliabilitas masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteia
Penyajian Laporan Keuangan Daerah(X1)	0.771	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah(X2)	0.884	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.857	Reliabel

Menurut *Wiratna Sujerweni (2014)*, kuesioner dikatakan reliabel jika nilai cronbach's alpha >0,6. Pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk variabel penyajian Laporan Keuangan Daerah(X1), Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2) dan Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) lebih besar dari 0,6 yang berarti bahwa instrument yang terdapat pada ketiga variabel tersebut dinyatakan reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Bila nilai residual tidak berdistribusi normal, maka uji statistika menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

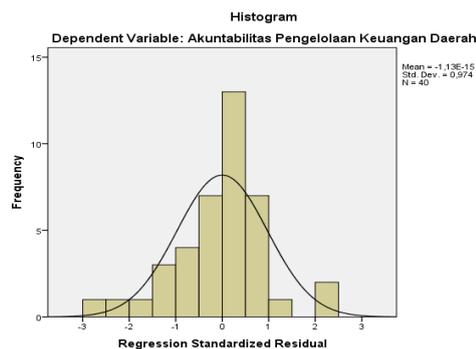
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,16413484
Most Extreme Differences	Absolute	0,117
	Positive	0,098
	Negative	-0,117
Test Statistic		0,117
Asymp. Sig. (2-tailed)		,185 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas diketahui bahwa nilai signifikansi $0,185 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Hasil analisis ini dapat lanjut ke analisis regresi. Dapat dilihat juga pada gambar histogram berikut:



Gambar 2 Histogram Normalitas

Pada gambar 2 di atas hasil uji histogram normalitas menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. Karena histogramnya berbentuk lonceng.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel- variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF > 10, terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika VIF < 10, tidak terjadi multikolinearitas. Maka untuk membuktikan uji multikolinearitas dapat di lihat pada table di bawah ini:

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	0.916	1.092
	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	0.916	1.092

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 8 di atas, karena nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskesdastisitas. Jika nilai signifikan (Sig) antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

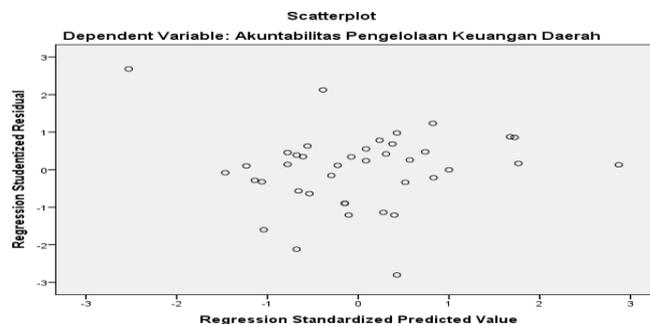
Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.354	5.100		1.834	0.075
	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	-0.132	0.103	-0.214	-1.276	0.210
	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	-0.014	0.075	-0.031	-0.185	0.854

a. Dependent Variable: Abs_Res

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 9 di atas, variabel penyajian laporan keuangan daerah nilai signifikansinya sebesar 0.210 dan variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah nilai signifikansinya sebesar 0.854. Artinya nilai ini lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk model regresi yakni pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0, 05. Dapat dilihat juga pada gambar 3 Grafik Scatterplot. Analisis pada gambar Scatterplot yang menyatakan model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas jika: 1) Titik-titik tidak menyebar diatas dan

dibawah atau sekitaran angka 0, 2) Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, 4) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.



Gambar 3 Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar 3 pada grafik Scatterplot residual dapat diketahui bahwa data berupa titik-titik menyebar secara merata diatas dan dibawah atau disekitar angka nol, tidak mengumpul hanya diatas angka nol atau dibawah angka nol saja, penyebaran titik-titik dan data tidak membentuk pola bergelombang kemudian menyempit dan melebar kembali dan penyebaran titik-titik tidak berpola sehingga dapat disimpulkan bahwa model kedua tidak mengalami Heteroskedastisitas. Untuk kedua model di atas maka dapat disimpulkan bahwa model ini lolos tidak terjadi Heteroskedastisitas, sehingga model ini dapat digunakan untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini.

3. Uji Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 10. Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.403	7.706		1.999	0.053
	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	0.370	0.156	0.347	2.370	0.023
	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	0.233	0.113	0.302	2.060	0.046

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada kolom Unstandardizer Coefficients bagian B diperoleh model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 15.403 + 0.370X_1 + 0.233X_2 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai Konstanta sebesar 15.403 menunjukkan harga konstan, dimana jika tidak ada variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah

yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) adalah sebesar 15.403

- b) Koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) sebesar 0.370, menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan variabel penyajian laporan keuangan daerah satu poin maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 0.370 satuan dengan anggapan variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) adalah tetap/konstan.
- c) Koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) sebesar 0.233, menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah satu poin maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 0.233 satuan dengan anggapan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) adalah tetap/konstan.
- d) Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Uji Signifikan (uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2), secara parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Nilai t hitung dapat diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistic yaitu SPSS 23 seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. Hasil Uji Signifikan (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.403	7.706		1.999	0.053
	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	0.370	0.156	0.347	2.370	0.023
	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	0.233	0.113	0.302	2.060	0.046

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 40 orang, maka nilai t tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = jumlah sampel (n) - jumlah variabel yang diteliti (k). Sehingga dalam penelitian ini $n = 40$ dan $k = 3$, jadi $df = 40 - 3 = 37$, maka dapat diperoleh t tabel dari penelitian ini adalah 1,687. Dari tabel uji parsial diatas dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah

H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki t hitung sebesar 2,370 dan t tabel 1,687 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,023 yang lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbukti.

b. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah(X2)

H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki t hitung sebesar 2,060 dan t tabel 1,687 dengan tingkat signifikansi 0,046 yang lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H2 diterima. Ini berarti aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah maka akan menimbulkan laporan keuangan daerah yang akuntabel.

b) Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2), secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

Tabel 12. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	146.317	2	73.158	6.933	,003 ^b
Residual	390.458	37	10.553		
Total	536.775	39			

- a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 12 di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian menunjukkan hasil F hitung sebesar 6.933 dengan signifikansi 0,003 yang lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.

c) Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,522 ^a	0.273	0.233	3.249

- a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Hasil regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,522 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 52,2%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan nilai R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,273 yang berarti bahwa variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independen (penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah) sebesar 27,3%.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

1) Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki t hitung sebesar 2,370 dan t tabel 1,687 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,023 yang

lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini berarti penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbukti. Dalam teori keagenan masyarakat (principal) memberikan wewenang pengaturan dan sumber daya kepada pemerintah (agent) berupa pajak, dan lain-lain. Disini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dan dengan hasil ini bisa dikatakan pemerintah telah melakukan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dalam bentuk penyajian laporan keuangan.

2) Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jadi dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjawaban penggunaan asset daerah maupun kontrol terhadap kebijakan - kebijakan keuangan yang diambil pemerintah, baik kontrol yang dilakukan oleh badan pemeriksa, masyarakat maupun investor. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3) Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah dan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam teorinya Shende dan Bennett mengisyaratkan diperlukannya tiga elemen penting dalam menegakkan reformasi di bidang pemerintahan (khususnya pengelolaan keuangan daerah).

F. PENUTUP

Simpulan

- 1) Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki t hitung sebesar 2,370 dan t tabel 1,687 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,023 yang lebih kecil dari 0,05.
- 2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki t hitung sebesar 2,060 dan t tabel 1,687 dengan tingkat signifikansi 0,046 yang lebih kecil dari 0,05.
- 3) Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Saran

- 1) Disarankan bagi Dinas PPKAD untuk menambah ban sweet web agar mudah diakses oleh publik serta penyediaan ruang akses laporan keuangan bisa ditingkatkan lagi terutama di website atau internet dikarenakan perkembangan teknologi semakin maju dan internet merupakan salah satu sarana yang dapat diakses publik.

- 2) Disarankan bagi penelitian selanjutnya dengan judul yang sama atau tema terkait untuk menambah variabel dan waktu penelitian agar hasil penelitian menjadi lebih baik lagi. Misalnya variabel kepuasan, variabel penggunaan informasi keuangan, variabel pengawasan fungsional, dll.
- 3) Di sarankan bagi masyarakat atau pengguna laporan keuangan, sebaiknya selalu mengakses berbagai informasi mengenai laporan keuangan daerah yang ada pada dinas PPKAD sehingga tidak terjadi ketertinggalan atas perkembangan Kabupaten Ngada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Sudibyo, “Kabupaten Ngada Meraih Predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” portal.ngadakab.go.id 2019
- Aliyah, Siti dan Aida, Nahar. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Auditing 8, no. 2. (2012) h. 1-14
- Christy Natalia Lewier dan Ch. Heni Kurniawan (2015) *Jurnal Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*.
- Fauziyah dkk, Miftahul Reza. 2017. *Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(6): 1-6
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 8. BP: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hehanussa, Salomi J. “*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*”. 2nd Cbam Vol.2 No 1. (2015) h. 82-91.
- Laksana dan Handayani (2014) *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Sumatera Barat*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Musofa, Anies Iqbal. 2012. *Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang*. Accounting Analisis Journal, 1(1): 1-6
- Nurhayani H. (2013). *Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (survey pada seluruh dinas pemerintahan kota bandung)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015). *Tentang Penyajian Laporan Keuangan*.
- Putu Sri Wahyuni dkk, (2014) *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Badung)*.
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

- Sande Peggy. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi. Vol. 1. No. 1. (2013)
- Septa Purwaningrum, Arif Hartono, Ika Farida Ulfah (2018) Jurnal *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo*
- Sumiyati. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan keuangan daerah dan Aksebilitas Laporan Keungan Daerah Terhadap Akuntabiitas Pengelolaan Keuangan daerah* (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir). *JomFekon*, .2(2): 1-15.
- Superdi. 2017. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah* (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Siunjung). *JOM Fekom*, 4(1).